

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan Pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Permerataan kemakmuran ini dapat dicapai melalui berbagai cara, diantaranya melalui pembinaan dan mendorong pertumbuhan yang serasi antara perusahaan besar dan perusahaan kecil serta koperasi. Usaha kecil dan menengah memiliki peranan yang strategis dalam menghidupkan kembali kegiatan ekonomi dalam negeri. Sektor UKM juga telah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis yang melanda Indonesia dan dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional.

Krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa UKM lebih dapat bertahan dan menjadi katup pengaman dalam perekonomian, daripada usaha skala besar yang mengalami kebangkrutan. UKM juga merupakan salah satu sektor usaha yang berperan dalam pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan oleh data BPS tahun 2006-2010 yang dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel I.1.**  
**Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan**  
**Usaha Besar**

| No | Indikator                           | Satuan   | Tahun 2006  | Tahun 2007  | Tahun 2008  | Tahun 2009  | Tahun 2010  |
|----|-------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Unit Usaha                          | (Unit)   | 49.026.380  | 50.150.263  | 51.414.262  | 52.769.280  | 53.828.569  |
|    | a. Usaha Mikro, kecil dan Menengah  | (Unit)   | 49.021.083  | 50.145.800  | 51.409.612  | 52.764.603  | 53.823.732  |
|    | - Usaha Mikro                       | (Unit)   | 48.512.438  | 49.608.953  | 50.847.771  | 52.176.795  | 53.207.500  |
|    | - Usaha Kecil                       | (Unit)   | 472.602     | 498.565     | 522.124     | 546.675     | 573.601     |
|    | - Usaha Menengah                    | (Unit)   | 36.763      | 38.282      | 39.717      | 41.133      | 42.631      |
|    | b. Usaha Besar                      | (Unit)   | 4.577       | 4.463       | 4.650       | 4.677       | 4.838       |
| 2. | Tenaga Kerja                        | (orang)  | 90.350.778  | 93.027.341  | 96.780.483  | 98.886.003  | 102.241.486 |
|    | a. Usaha Mikro, kecil dan Menengah  | (orang)  | 87.909.598  | 90.491.930  | 94.024.278  | 96.211.332  | 99.401.775  |
|    | - Usaha Mikro                       | (orang)  | 82.071.144  | 84.452.002  | 87.810.366  | 90.012.649  | 93.014.759  |
|    | - Usaha Kecil                       | (orang)  | 3.139.711   | 3.278.793   | 3.519.843   | 3.521.073   | 3.627.164   |
|    | - Usaha Menengah                    | (orang)  | 2.698.743   | 2.761.135   | 2.694.069   | 2.677.565   | 2.758.852   |
|    | b. Usaha Besar                      | (orang)  | 2.441.181   | 2.535.411   | 2.756.205   | 2.674.671   | 2.839.711   |
| 3. | PDB Atas Dasar Harga Konstan (2000) | (Milyar) | 1.770.508,3 | 1.883.549,1 | 1.997.938,0 | 2.089.058,5 | 2.217.947   |
|    | a. Usaha Mikro, kecil dan Menengah  | (Milyar) | 1.035.615,3 | 1.100.670,9 | 1.165.753,2 | 1.212.599,3 | 1.282.571,8 |
|    | - Usaha Mikro                       | (Milyar) | 588.505,9   | 620.864     | 655.703,8   | 682.259,8   | 719.070,2   |
|    | - Usaha Kecil                       | (Milyar) | 189.666,7   | 204.395,4   | 217.130,2   | 224.311,0   | 239.211,4   |
|    | - Usaha Menengah                    | (Milyar) | 257.442,6   | 275.411,4   | 292.919,1   | 306.028,5   | 324.930,2   |
|    | b. Usaha Besar                      | (Milyar) | 734.893     | 782.878,2   | 823.184,8   | 876.459,2   | 935.375,2   |
| 4. | PDB Atas Dasar Harga Berlaku        | (Milyar) | 3.171.417,1 | 3.745.549,3 | 4.693.809   | 6.068.762,8 | 2.897345,7  |
|    | c. Usaha Mikro, kecil dan Menengah  | (Milyar) | 1.783.432,8 | 2.107.868,1 | 2.613226,1  | 3.466.393,3 | 1.682.969,5 |
|    | - Usaha Mikro                       | (Milyar) | 1.017.438,7 | 1.209.622,5 | 1.510005,8  | 2.051.878   | 1.034.439,3 |
|    | - Usaha Kecil                       | (Milyar) | 329.215,3   | 386.404,3   | 472.830,3   | 597.770,2   | 268.554,9   |
|    | - Usaha Menengah                    | (Milyar) | 436.769,8   | 511.841,3   | 630.339,9   | 816.745,1   | 379.975,3   |
|    | d. Usaha Besar                      | (Milyar) | 1.387.993,3 | 1.637.681,2 | 2.080582,9  | 2.602.396,5 | 1.214.376,2 |

Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)

Dari data BPS diatas, diketahui pada tahun 2010 total nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp. 2.897345,7 milyar, dari jumlah tersebut UKM memberikan kontribusi sebesar 57,12% dari total PDB di Indonesia. Sedangkan dalam hal penyerapan tenaga kerja, peran UKM pada tahun 2010 tercatat sebesar 102.241.486 orang atau sebesar

97,22% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada. Data tersebut menunjukkan bahwa UKM memiliki peranan yang sentral dalam perekonomian Indonesia dalam menyediakan lapangan kerja dan menghasilkan output yang berguna bagi masyarakat.

Namun dengan baiknya kontribusi dan peranan UKM tersebut, dari sisi produktivitas UKM per unit usaha selama periode 2002-2008 belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan mengungkapkan bahwa:

Secara merata produktivitas UMK pada tahun 2002-2008 hanya sebesar Rp. 14,87 juta per unit usaha per tahun dan usaha menengah sebesar Rp. 2,87 milyar. Sementara itu, produktivitas per unit usaha besar telah mencapai Rp. 113 milyar. Demikian pula dengan perkembangan produktivitas per tenaga kerja UMKM masih berkisar Rp. 8,97 juta untuk usaha mikro dan kecil, serta Rp. 68,39 juta untuk usaha menengah. Sedangkan produktivitas per tenaga kerja usaha besar telah mencapai Rp. 240,25 juta<sup>1</sup>.

Perkembangan produktivitas UKM yang belum signifikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang masih saja dihadapi oleh UKM yaitu dalam hal permodalan, keterampilan manajemen, teknik pemasaran teknologi serta kualitas sumber daya manusia yang rendah. Masalah yang dihadapi tersebut akan berimbas pada jalannya suatu usaha dan prospek pengembangannya. BPS menyajikan data tentang jenis kesulitan apa saja yang menghambat pengembangan UKM di Indonesia dan pada khususnya Jakarta.

---

<sup>1</sup>Josephus primus, *Produktivitas UKM Belum Berkembang*, 2010 , p.1  
(<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/19/18472579/Produktivitas.UMKM.Belum.Berkembang>)  
diakses tanggal 21 maret 2013

Tabel I.2.

Jenis kesulitan yang dialami UKM di Indonesia

| Tahun | Jenis kesulitan utama |           |        |
|-------|-----------------------|-----------|--------|
|       | Bahan baku            | Pemasaran | Modal  |
| 2011  | 25,80%                | 26,59%    | 33,13% |
| 2012  | 26,67%                | 21,26%    | 36,56% |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel I.3.

Jenis Kesulitan Yang Dialami Oleh UKM di Jakarta

| Tahun | Jenis kesulitan utama |           |        |
|-------|-----------------------|-----------|--------|
|       | Bahan baku            | Pemasaran | Modal  |
| 2011  | 14,97%                | 19,62%    | 45,42% |
| 2012  | 22,81%                | 26,71%    | 36,53% |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data BPS diatas menunjukkan bahwa jenis kesulitan utama yang dihadapi paling besar adalah pemodalannya selanjutnya pemasaran dan bahan baku. Sejalan dengan hal tersebut Tulus Tambunan juga mengungkapkan bahwa:

“Masalah umum yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah adalah keterbatasan modal kerja atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, SDM dengan kualitas yang baik (terutama manajemen dan teknisi produksi, informasi pasar dan kesulitan dalam hal pemasaran termasuk distribusi”<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), p. 69

Dari data BPS diatas telah dikemukakan bahwa masalah utama yang dihadapi UKM merupakan dalam hal permodalan. Masalah permodalan UKM ini merupakan salah satu faktor utama yang sampai saat ini masih menjadi hambatan dalam perkembangan UKM Indonesia. Semenjak krisis moneter peluang UKM untuk mendapatkan bantuan modal dari lembaga pembiayaan bank maupun non bank semakin berkurang. Dalam dunia usaha tentunya faktor modal merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan semua usaha. Tidak ada satupun perusahaan yang mampu maju tanpa dukungan dana yang cukup. Dalam hal ini umumnya UKM memenuhi permodalannya dengan tabungan atau dana yang berasal dari pembiayaan keluarga. Data BPS survey industri mikro dan kecil 2012 menunjukkan bahwa sumber modal usaha UKM umumnya merupakan milik sendiri, yaitu sebesar 71,67 persen, sedangkan usaha dengan modal sebagian dari pihak lain sebesar 22,44 persen<sup>3</sup>. Namun kebutuhan modal tersebut tentunya tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan tabungan individu. Pada saat internal tidak lagi mampu memenuhi rencana ekspansi, maka perusahaan pada umumnya akan mulai mencari sumber dana eksternal.

Dengan adanya berbagai masalah yang menghinggap pengembangan UKM, maka diperlukan upaya pengembangan UKM yang bersinergi antara Pemerintah, sector swasta dan masyarakat mengingat peranan UKM cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam

---

<sup>3</sup>Badan Pusat Satatistik. *op. cit.*, p. 48

upaya pengembangan UKM ini pemerintah telah merancang kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan usaha UKM dengan berbagai cara. Diantaranya melakukan kemitraan usaha besar dengan usaha kecil, pembinaan oleh BUMN dan peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UKM. Selain itu juga pemerintah mencanangkan program pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil oleh lembaga-lembaga pemerintah pada khususnya dalam pengembangan usaha kecil. Mulai dari Deperindag, Depdikbud, Depnaker, Depsos, Depkeu, Bappenas, Depkop dan pppk, lembaga swasta dan perorangan, LSM, lembaga penelitian di perguruan tinggi dan asosiasi pengusaha kecil.

Di Indonesia pembiayaan dengan kredit bank nampaknya masih menjadi sumber dana yang utama. Hal ini tidaklah mengherankan, mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang paling tua di Indonesia yang tentunya lebih dikenal oleh masyarakat dibanding lembaga keuangan lainnya. Sejak bank Indonesia mengeluarkan kebijakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), sebagian besar bank-bank berlomba untuk menciptakan berbagai jenis kredit termasuk kredit usaha skala mikro dan kecil.

Namun dilain pihak tingginya tingkat suku bunga, besarnya agunan yang dituntut oleh bank serta adanya berbagai persyaratan kredit yang sering kali menyulitkan pengusaha dalam memperoleh tambahan dana, terutama bagi pengusaha UKM. Berdasarkan data Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), jumlah UKM yang sudah

dibiayai bank umum baru mencapai 47,17 persen atau sekitar 24,88 juta UKM. Sementara sisanya, 52,83 persen atau sekitar 27 juta lebih UKM belum tersentuh perbankan<sup>4</sup>. Dilain pihak, BPS melaporkan bahwa presentase usaha mikro dan kecil indonesia yang telah memanfaatkan pinjaman bank pada tahun 2009 16.68% dari 22.17% usaha yang memanfaatkan pinjaman. Belum lagi besarnya jumlah kredit macet menyebabkan perbankan sangat berhati-hati dalam memberikan kredit.

Dari beberapa alasan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak Pelaku UKM masih banyak yang belum *bankable*. Selain itu juga faktor dalam pengembangan suatu usaha tidak hanya diukur dari tingkat kecukupan modal, tetapi juga harus didukung oleh pengelolaan usaha, produksi dan pemasaran yang baik. Dalam hal ini perbankan hanya mampu memberikan kecukupan modal tetapi tidak di imbangi dengan pembinaan pasca pencairan kredit. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ) Rachmat Gobel menjelaskan bahwa “kalau manajemen keuangan, personalia, dan operasionalnya tidak bagus, diberikan modal berapapun pasti tidak berkembang”<sup>5</sup>. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha kecil membutuhkan pendampingan dalam melakukan ekspansi usahanya bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dalam sisi permodalan.

---

<sup>4</sup>Djoko, *Perbankan Belum Serius Gandeng UKM*, 2013, (<http://log.viva.co.id/news/read/220335-ukm-potensi-pasar-bagi-bisnis-perbankan>) diakses tanggal 15 Januari 2013

<sup>5</sup>Rahmat, Christine Franciska dan Amri Nur, *INDUSTRI KECIL: Manajemen (Masih) Menjadi Masalah Utama Kelangsungan Usaha*, 2013 (<http://archive.bisnis.com/articles/industri-kecil-manajemen-masih-menjadi-masalah-utama-kelangsungan-usaha>) Diakses tanggal 3 maret 2013

Melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK013/1988, pemerintah membentuk modal ventura sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang di fokuskan untuk membantu pengembangan usaha UKM. Modal ventura merupakan salah satu jenis pembiayaan yang dilakukan dengan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan usaha modal ventura diatur melalui Keputusan Presiden No.61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Perkembangan PMV di Indonesia telah dimulai sejak didirikannya PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia kegiatan utamanya adalah membantu perusahaan dalam pengembangan usaha. Seiring dengan berjalannya waktu perusahaan modal ventura di Indonesia mulai berkembang. Perkembangan perusahaan modal ventura dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.4

Perkembangan Perusahaan Modal Ventura di Indonesia

| Tahun | Jumlah Perusahaan Modal Ventura | Jumlah PPU |
|-------|---------------------------------|------------|
| 2008  | 66 perusahaan                   | 3.502 unit |
| 2009  | 74 perusahaan                   | 7.770 unit |

Sumber: BAPEPAM

Hingga saat ini Perusahaan yang menjalankan kegiatan modal ventura di Indonesia tercatat sebanyak 74 perusahaan per desember 2009, dimana jumlah tersebut terdiri dari 36 perusahaan swasta nasional, 11 perusahaan patungan, dan 27 perusahaan daerah. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 66 perusahaan<sup>6</sup>. Sejalan dengan peningkatan jumlah perusahaan modal ventura, perusahaan pasangan usaha yang dibiayai juga mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 jumlah PPU tercatat sebanyak 3.502 unit, selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi sebanyak 7.770 unit usaha<sup>7</sup>. Dari banyaknya jumlah perusahaan modal ventura di Indonesia salah satu diantaranya adalah PT. PNM Venture capital yang dibentuk oleh pemerintah secara khusus untuk membantu pengembangan UKM. Salah satu perusahaan modal ventura yang memberikan focus utama penyertaan modalnya pada UKM adalah PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital (PT. PNMVC).

PT. PNMVC ini ditugaskan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan memberdayakan UKM sebagai pilar nasional, serta secara implisit tertuang dalam substansi PP no. 38/1999 tertanggal 25 Mei 1999 agar mengembangkan modal ventura dengan melaksanakan aktifitas pembiayaan dan permodalan langsung kepada UKM dalam rangka

---

<sup>6</sup>Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Laporan Studi Potensi Perusahaan Modal Ventura Sebagai Alternative Investasi*, Kemetrian keuangan Republik Indonesia, Tahun anggaran 2010, p. 2  
<sup>7</sup>*Ibid.*,

membangun dan mengembangkan kewirausahaan. UKM yang menjadi pasangan usaha dalam perusahaan modal ventura ini sebagian besar juga mengalami permasalahan utama yaitu permodalan. Hasil wawancara dengan Direktur PT.PNMVC, Iwan Ridwan menyatakan bahwa (April, 2013)

“Kami hadir sebagai alternative dibalik kebingungan para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya, permasalahan yang sampai saat ini masih membelit pengembangan UKM di Indonesia sedikit demi sedikit coba kami bantu lewat misi kami yang kami lakukan secara menyeluruh yang mencakup penyediaan dana dan bantuan manajemen demi meningkatkan kemampuan wirausahawan dalam menciptakan produk dan layanan yang bernilai tinggi.”

Hal ini menunjukkan bahwa Penyertaan modal oleh PT. PNMVC ini sangat berbeda dengan kredit yang diberikan oleh perbankan. Perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan Perbankan adalah, perusahaan modal ventura tidak hanya melakukan penyertaan modal kepada UKM sebagai perusahaan pasangan usaha (PPU) tetapi juga turut membina pengembangan UKM tersebut dengan turut aktif dalam mengelola manajemennya. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa UKM yang mengajukan diri menjadi calon perusahaan pasangan usaha merupakan UKM yang berada dalam tahap ingin berkembang dimana mereka sebagian besar mengalami permasalahan dalam hal permodalan dan kegiatan usahanya. Beliau mengatakan bahwa “modal masih menjadi kendala utama, tetapi kendala lain yang terkait dengan pemasaran, kualitas produk dan kualitas SDM juga tidak kalah mendesak.” Sebanyak lebih dari 90% UKM tersebut mengalami kekurangan modal dalam usahanya

disertai dengan lemahnya keterampilan manajemen dan sumber daya, jaringan pemasaran, bahan baku serta teknologi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui pengaruh pembiayaan modal ventura terhadap pengembangan UKM di Jakarta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh teknik pemasaran terhadap pengembangan UKM Di Jakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh jumlah bahan baku terhadap pengembangan UKM Di Jakarta ?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat penggunaan teknologi terhadap pengembangan UKM Di Jakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat kualitas sumber daya manusia terhadap pengembangan UKM Di Jakarta?
5. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan modal ventura terhadap pengembangan UKM Di Jakarta?

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi ternyata masalah pengembangan usaha kecil dan menengah menyangkut beberapa faktor permasalahan yang luas dan kompleks. Dengan berbagai pertimbangan, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti hanya pada masalah pengaruh pembiayaan modal ventura terhadap pengembangan UKM di Jakarta (Studi kasus pada PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital).

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “apakah terdapat pengaruh pembiayaan modal ventura terhadap pengembangan UKM di Jakarta”

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, sebagai pengalaman berharga dan merupakan sarana menambah ilmu mengenai pengembangan usaha kecil dan menengah khususnya pengaruh pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani Vecture Capital dalam mengembangkan UKM di Jakarta.

## 2. Kegunaan Praktis,

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pengusaha UKM di Jakarta untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan modal dan pembinaan dalam rangka pengembangan UKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan acuan, dan pertimbangan bagi pihak suku dinas UKM, Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan perusahaan modal ventura lainnya dalam mengambil kebijakan, guna mengembangkan potensi UKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.